

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Ahmad, 2005, *Keterpurukan Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat, *Toeri Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis : Toeri & Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2013, *Laporan Hasil Akhir Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*, Kemenkumham, Jakarta
- Brun, Jean-Pierre *et al.*, 2011, *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, The World Bank, Washington DC.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minnesota.
- Candra, Septa, *et.al.*, 2012, *Hukum dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi)*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Efendi, Marwan, 2010, *Korupsi dan Pencegahan*, Timpani, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta.
- Friedman, Lawrence M, 1975, *The Legal System : a Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2008, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herimulyanto, Agustinus, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Gento Publishing, Yogyakarta.
- Jamali, R. Abdul, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Indriyanto, 1998, *Uang Pengganti*, Citra Adiya Bakti, Jakarta.
- Iskandar, Mia Amiati, 2013, *Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOT 2000 dan UNCAC 2003*, Referensi, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Makwawimbang, Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- M.D, Moh. Mahfud, 1998, *Politik hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3S, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Monetary Fund, International, 2009, *Austria : Detailed Assesment Report On Anti-Money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism*, Publication Service, Washington DC.

\_\_\_\_\_, 2014, *Kingdom of the Netherlands-Netherlands : Detailed Assessment of Standards and Code of Kingdom of the Netherland*, Publication Services, Washington, DC

O.S Hiariej, Eddy, *et.al.*, 2012, *Pidana dalam Perpektif*, Pustaka Iarasan.

O.S Hiariej, Eddy, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2019, *Asas legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Kansil, Cst *et.al.*, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta.

Kholis, Efi Laila, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta.

Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Transparency International Indonesia, Jakarta.

Pramono, Widyo, 2016, *Pemberantasan Korupsi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Prodjoharmidjojo, Martiman, 1989, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.

Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana : komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pदानannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Seno Adji, Indriyanto, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.

Setyardjo, Pradhana Probo dan Muhammad Al Asyhari, 2019, *Menjegal Koruptor Mantan Narapidana Korupsi dalam Pertarungan Politik di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

Soekanto, Soerjono 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

\_\_\_\_\_, (b), 1986, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta

Soekanto, Soerjono, dan Sei Mamudji, 2019, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung.

Theodore S. Greenberg *et al*, 2009, *Stolen Asset Recovery-Good Practice Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB Aset Forfeiture)*, The World Bank, Washington.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyono, R., 2011, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yanuar, Purwaning M, 2015, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.

Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT. Kompas, Jakarta.

Zulkarnaen, 2017, *Penyitaan dan Eksekusi*, Pustaka Setia, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Peraturan mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2041 Tahun 2014)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan aset. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 857 Tahun 2014)

Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.

### **C. Konvensi**

Rome Statute for International Criminal Court 1998 (UN General Assembly, *Rome Statute 1998*).

United Nations Convention Against Corruption 2003

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the proceeds from crime, European Treaty Series, No. 141, Strasbourg, 8, XI, 1990

### **D. Pidato**

Erna, Bernadeta Maria, Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013

O.S Hiariej, Eddy, 2012, Pidana dalam Perspektif: Pembuktian terbalik dalam pengembalian aset kejahatan korupsi, *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, tanggal 30 Januari 2012

## **E. Jurnal, Tesis, dan Internet**

- Ariawan, I Gusti Ketut, 2008, “Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan dalam Mengembalikan Aset Negara”, *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 33 No. 1 Januari 2008,
- Alkostar, Artidjo, 2008, Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal*, Varia Peradilan No. 275.
- Harwiadi, 2017, “Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Herimulyanto, Agustinus, 2018, “Sita Aset Berbasis Nilai dan Pembuktian dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Madusira, Muhammad Aras, 2011, “Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Munzil, Fontian, *et.al.*, 2015 “Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Uang Pengganti dalam rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO.1 VOL. 22 JANUARI 2015.
- Prakarsa, Aliyth dan Rena Yulia, 2017, “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol.6 No. 1 Tahun 2017 hlm.41
- Salmi, Akhiar, “Pidana Pembayaran uang pengganti: dulu kini dan masa datang”, *Jurnal hukum dan pembangunan*, edisi khusus Dies Natalis 85 tahun FHUI.
- Mulyadi, Lilik, 2007, “Asas Pembalikan beban pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dihubungkan dengan konvensi perserikatan bangsa bangsa anti korupsi”, *majalah Varia Peradilan* Nomor 264 bulan November
- Tommaso Trinchera, “Confiscation And Asset Recovery: Better Tools To Fight Bribery And Corruption Crime”, *Criminal law forum*, Vol. 31 No. 1, 27 Januari 2020, hlm. 60.

Australian Government, 2002, "Proceeds of Crime Act 2002 No. 85, 2002", <https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C01127> diakses pada tanggal 17 Juni 2020.

Australian Institute of Criminology, "Confiscation of the proceeds of crime : federal overview", <https://aic.gov.au/publications/tcb/tcb001>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020.

Atmasasmita, Romly, 2012, "Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" <https://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pasca-ratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia> diakses tanggal 01 Maret 2020.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2015, "Penyelarasan Naskah Akademik Perampasan aset", Kemenkumham, Jakarta, <https://www.bphn.go.id/data/documents/PENYELARASAN-NASKAH-AKADEMIK-PERAMPASAN-ASET.PDF> diakses tanggal 27 Juni 2020

Brocardi.it, "Article 240 of the Italian Criminal Code (CodicePenale)", <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-viii/capo-ii/art240.html> diakses pada 9 Juni 2020.

\_\_\_\_\_, "Article 322 ter of the Italian Criminal Code (CodicePenale)", <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art322ter.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2020.

Council of Europe, 2013, *Impact study on Civil Forfeiture*, Publisher Council of Europe Office in Belgrade, Belgrade, hlm 10-11. <https://rm.coe.int/impact-study-on-civil-forfeiture-en/1680782955> diakses pada tanggal 27 Juni 2020.

\_\_\_\_\_, 2017, "Netherlands – national procedures for mutual legal assistance on laundering, search, seizure and confiscation of proceeds of crime", <https://rm.coe.int/netherlands-template-country-information-ets-141/1680724945> diakses tanggal 1 Juli 2020.

Dwita Komala Sari, 2017, "Kejahatan Kerah Putih (*White collar crime*) di asia", <https://medium.com/@dwitaks/kejahatan-kerah-putih-white-collar-crime-di-asia-5199c723601e> diakses pada tanggal 01 April 2020.

Daan Folgering and Niels van der Laan, 2015, "Legal Experience Advocaten and De Roos & Pen", [https://deroosenpen.nl/wp-content/uploads/2015/10/Getting\\_the\\_deal\\_through\\_-\\_Asset\\_Recovery-1.pdf](https://deroosenpen.nl/wp-content/uploads/2015/10/Getting_the_deal_through_-_Asset_Recovery-1.pdf) diakses tanggal 20 Juni 2020



- Fariz, Donal 2013, “Perlunya Aturan Illicit Enrichment untuk Cegah Korupsi Lantaran terdapat kelemahan dalam UU Pemberantasan Tipikor terkait pengembalian kerugian Negara”, <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5273ab9aace4d/perlunya-aturan-illicit-enrichment-untuk-cegah-korupsi> diakses pada tanggal 22 Juni 2020
- Herbert Smith Freehills LLP, “Asset Recovery in England and Wales”, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2351ac64-ff6b-4a97-8082-11c0b3a202b6> diakses pada tanggal 10 Juni 2020
- Husein, Yunus, 2007, “Peranan PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang”, [https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/22\\_peranan-ppatk-sebagai-fiu\\_x.pdf](https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/22_peranan-ppatk-sebagai-fiu_x.pdf) diakses tanggal 11 Agustus 2020
- Harris solicitors, “POCA Restraint orders”, <https://harrissolicitors.org.uk/services/poca-restraint-orders/> diakses tanggal 13 Juli 2020 pukul 16.48 Wib.
- Juhriyadi, 2019 “Kejaksaan Agung Masih Inventarisir Koruptor Penunggak Uang Pengganti untuk Digugat” <https://independensi.com/2019/04/11/kejaksaan-agung-masih-inventarisir-koruptor-penunggak-uang-pengganti-untuk-digugat/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019
- Lorana Bartels, “A review of confiscation schemes in Australia”, <https://nswbar.asn.au/circulars/2010/march/confiscation.pdf> diakses pada tanggal 17 Juni 2020.
- OECD, 2018, ”Confiscation Of Instrumentalities And Proceeds Of Corruption Crimes in Eastern Europe and Central Asia“, <https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-Confiscation-of-Proceeds-of-Corruption-Crimes-ENG.pdf> diakses pada tanggal 15 Juni 2020.
- \_\_\_\_\_, 2020, “Netherlands Review Of Implementation Of The Convention and 1997 Recommendation”, <http://www.oecd.org/netherlands/2020264.pdf> diakses tanggal 30 Juni 2020
- Reski, Ade Fajar, “Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam”, *Jurnal Universitas Sumatera Utara* Halaman 14-15, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/17694/7511> diakses tanggal 01 Maret 2020.
- Sujatmiko, Bambang, 2011, “Eksistensi Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Tindak pidana Korupsi di Kabupaten Kota Waringin Barat”, *Jurnal socioscentia kopertis wilayah XI Kalimantan*, Edisi Februari 2011,



Volume 3 Nomor 1, <https://digilib.und.ac.id> diakses pada tanggal 12-10-2014 pukul 10.15 wib.

Wikipedia, “restraint order”, [https://en.wikipedia.org/wiki/Restraint\\_order](https://en.wikipedia.org/wiki/Restraint_order), diakses tanggal 13 Juli 2020 pukul 16.40 Wib.

The National Archives, “Proceeds of Crime Act”, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/section/10> diakses pada tanggal 10 Juni 2020

The Negotiating Conference, “Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions Article 3 (3)”, [https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery\\_ENG.pdf](https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf) diakses pada tanggal 9 Juni 2020.

United Nations Office On Drugs And Crime, “United Nations Convention Against Corruption Article (4), (5), (6)”, [https://www.unodc.org/documents/brussels/UN\\_Convention\\_Against\\_Corruption.pdf](https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf) diakses pada tanggal 9 Juni 2020.